

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA

Arief Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.”

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2005, Bandung. Hlm. 23.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238.”

Cristina Maglie, ‘Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law’, Washington University Global Studies Law Review, (Volume 4: 547, Januari 2005)., hlm. 556.”

Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, h. 32.”

Detik, 2022, *Promosi Ala Holywings Yang Blunder Jadi Penistaan Agama*, <https://www.detik.com>, diakses pada 28 Februari 2023

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 21.

Herbert L Parker, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, hlm 153

I Wayan Artana SH, M. H. (2017). TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PENISTAAN AGAMA. *Kerta Dyatmika*, 14(1).

Ibid.”

Jati, Wasisto Raharjo, 2013, *Pengantar Kajian Globalisasi Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm 34

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hal. 144-145.

Lala, A. (2017). Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(3), 28-39.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 11.

Lubis, M. A. F. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Mahupiki*, 2(01).

Luthfiyah, A. G. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Oleh Holywings Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rieneka Cipta, hlm 23

Muhammad Gribaldi, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Nomor:237/PID.SUS/2013/PN.TK), Diligib Unila, URL:

<http://digilib.unila.ac.id/532/1/COVER%20DALAM.pdf>, diakses tanggal 6 Maret 2017.

Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, h. 157.

Muladi, 2010, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Hukum*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No 5, hlm 1-20

Mulyati Pawempei Dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015. h. 5.

Nasution, V. P. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Partai Politik Melalui Media Sosial (Studi Di Polres Labuhan Batu)* (Doctoral dissertation).

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana*, Cetakan ke 7, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5

Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 2(1), 1-12.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indoensia, 1982), hal. 250.

Safrina, N., Yusrizal, Y., & Zulkifli, Z. (2022). ANALISIS HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37-65.

Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, h. 15.”

Suri, A. F. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA MELALUI MEDIA INTERNET OLEH RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH RIAU. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 5(2), 1-15.

Totok Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia dan sistem hukum Indonesia*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2019. h. 126-127.”

Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017. h. 1.”

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2009), hal. 73.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.